



MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG PUBLIK BARU: Meninjau Ulang Peran Teologi Publik di Era Digital

I Gusti Bagus Andronikus

Sekolah Tinggi Teologi Marturia Palu, Indonesia

Korespondensi: andronikusmarturia@gmail.com

Keywords	Abstract
Digital theology; digital transformation; public sphere; public theology; social media.	<i>The rapid development of social media has fundamentally transformed the public sphere from a conventional social space into a digital environment that shapes communication, participation, and public opinion formation. This transformation presents new challenges for public theology, which has largely developed within the framework of the conventional public sphere. This article aims to reflect on social media as a new public sphere while re-examining the role of public theology in contemporary digital society. Employing a qualitative library research approach, this study critically analyzes scholarly literature on public theology, the public sphere, social media, and digital theology. The findings indicate that social media should no longer be understood merely as a communication tool for the church but as a public sphere that reshapes how people engage in dialogue, construct relationships, and pursue the common good. Consequently, public theology requires a conceptual reconstruction to remain relevant within an increasingly digital society. This article proposes four interrelated dimensions of reconstructed public theology: digital presence, digital dialogue, digital public witness, and digital responsibility. These dimensions provide a conceptual framework for reinterpreting the church's role as a public actor in the digital age. Accordingly, the article contributes to the development of public theology by positioning social media not merely as a ministry platform but as a new sphere of public witness that calls the church to exercise an ethical, dialogical, and transformative presence.</i>
Kata Kunci	Abstrak
Digital theology; media sosial; ruang publik; teologi publik; transformasi digital.	Perkembangan media sosial telah mentransformasi ruang publik secara fundamental dari ruang sosial konvensional menjadi ruang digital yang membentuk pola komunikasi, partisipasi, dan pembentukan opini publik. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi teologi publik yang selama ini berkembang dalam konteks ruang publik konvensional. Artikel ini bertujuan merefleksikan media sosial sebagai ruang publik baru sekaligus meninjau ulang peran teologi publik dalam masyarakat digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (<i>library research</i>) melalui analisis kritis terhadap berbagai literatur mengenai teologi publik, ruang publik, media sosial, dan <i>digital theology</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai sarana komunikasi gereja, tetapi sebagai ruang publik yang mentransformasi cara masyarakat berdialog, membangun relasi, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, teologi publik memerlukan rekonstruksi konseptual agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat digital. Artikel ini mengusulkan empat dimensi rekonstruksi teologi publik, yaitu kehadiran digital (<i>digital presence</i>), dialog digital (<i>digital dialogue</i>), kesaksian publik digital (<i>digital public witness</i>), dan tanggung jawab digital (<i>digital responsibility</i>) sebagai kerangka konseptual untuk memahami kembali peran gereja sebagai aktor publik di era digital. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan refleksi teologis mengenai media sosial bukan sekadar sebagai media pelayanan, melainkan sebagai ruang kesaksian publik yang menuntut kehadiran gereja secara etis, dialogis, dan transformatif.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, membangun relasi sosial, memperoleh informasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan publik. Media sosial tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi telah berkembang menjadi ruang tempat gagasan diproduksi, identitas dinegosiasikan, nilai diperdebatkan, dan opini publik dibentuk secara terus-menerus. Dengan karakteristiknya yang partisipatif, interaktif, dan lintas batas, media sosial telah mentransformasi ruang publik dari arena fisik yang terbatas menjadi ruang digital yang bersifat terbuka, dinamis, dan berlangsung hampir tanpa henti. Transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar menghadirkan media komunikasi baru, tetapi juga mengubah struktur, pola interaksi, dan mekanisme pembentukan ruang publik itu sendiri (Habermas, 1989; Habermas, 2022; van Oorschot, 2022).

Perubahan tersebut turut memengaruhi praktik keberagamaan. Aktivitas keagamaan yang sebelumnya berpusat pada ruang-ruang fisik kini semakin banyak berlangsung melalui ruang digital, mulai dari ibadah daring, pelayanan pastoral digital, pembelajaran teologi, hingga diskusi keagamaan melalui berbagai platform media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu arena utama tempat agama hadir, dipraktikkan, dan diperdebatkan dalam masyarakat kontemporer. Dalam kajian *digital religion*, perkembangan tersebut dipahami sebagai pergeseran dari penggunaan teknologi sebagai alat komunikasi menuju terbentuknya budaya religius yang dikonstruksi melalui interaksi digital. Dengan demikian, media sosial tidak lagi sekadar menjadi instrumen penyebaran pesan keagamaan, melainkan telah membentuk cara baru manusia mengalami, menafsirkan, dan mengomunikasikan iman dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, transformasi ruang publik digital menghadirkan persoalan yang semakin kompleks. Algoritma platform media sosial mendorong penyebaran informasi secara cepat, tetapi pada saat yang sama juga memperkuat polarisasi, menciptakan *echo chambers*, memfasilitasi penyebaran disinformasi, serta mempersempit ruang dialog yang sehat. Akibatnya, ruang publik digital sering kali tidak berkembang sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan percakapan rasional demi kepentingan bersama, melainkan menjadi arena kompetisi narasi, kontestasi identitas, bahkan konflik sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi ruang publik digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan etika, politik, budaya, dan kehidupan bersama yang memerlukan refleksi kritis dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi.

Dalam konteks inilah teologi publik (*public theology*) memperoleh relevansinya. Sejak berkembang pada dekade 1970-an dan 1980-an, teologi publik menegaskan bahwa refleksi teologis tidak boleh berhenti pada kehidupan internal gereja, melainkan harus hadir dalam ruang publik untuk berpartisipasi dalam percakapan mengenai persoalan-persoalan bersama. Dengan kata lain, teologi publik berupaya menjembatani iman Kristen dengan kehidupan sosial melalui dialog yang terbuka, rasional, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, sebagian besar kerangka konseptual teologi publik berkembang ketika ruang publik masih dipahami terutama sebagai ruang



sosial-politik konvensional. Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital menghadirkan konteks yang berbeda karena publik kini dibentuk oleh logika algoritma, budaya jaringan (*networked publics*), partisipasi digital, dan mediasi teknologi. Oleh sebab itu, perubahan struktur ruang publik tersebut menuntut peninjauan ulang terhadap asumsi-asumsi dasar teologi publik mengenai makna "publik", bentuk dialog, serta pola kehadiran gereja dalam masyarakat digital (van Oorschot, 2022).

Beberapa penelitian mutakhir mulai menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap hubungan antara teologi publik dan transformasi digital. Van Oorschot (2022), misalnya, menegaskan bahwa digitalisasi telah melahirkan bentuk-bentuk ruang publik baru yang memengaruhi cara teologi berpikir dan bertindak di ruang publik. Selanjutnya, Okey (2023) melalui pembacaan kembali terhadap pemikiran David Tracy mengemukakan bahwa perkembangan ruang digital menantang pemahaman tradisional mengenai *publics* dalam teologi publik dan membuka kemungkinan lahirnya pendekatan-pendekatan baru dalam berteologi. Lebih lanjut, bab "Public Theology and Digitality" dalam *The Oxford Handbook of Digital Theology* menegaskan perlunya pengembangan *critical public digital theology* yang mampu secara kritis membaca transformasi digital, struktur kekuasaan digital, serta perubahan pola partisipasi masyarakat dalam ruang publik digital.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih lebih banyak berfokus pada hubungan antara teologi dan digitalisasi secara umum atau pada pengembangan bidang *digital theology*. Sementara itu, pembahasan yang secara khusus menempatkan media sosial sebagai transformasi ruang publik yang menuntut peninjauan ulang terhadap peran teologi publik masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks kajian teologi di Indonesia. Sebagian besar penelitian nasional lebih menyoroti media sosial sebagai sarana komunikasi gereja, media pelayanan, atau instrumen literasi digital, sehingga dimensi perubahan konseptual mengenai makna ruang publik belum memperoleh perhatian yang memadai. Celah inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan meninjau ulang peran teologi publik dalam konteks transformasi ruang publik digital dengan menjadikan media sosial sebagai fokus analisis. Artikel ini berargumen bahwa media sosial tidak hanya memperluas ruang komunikasi gereja, tetapi telah mentransformasi karakter ruang publik sehingga menuntut pembaruan cara teologi publik memahami kehadiran, dialog, kesaksian, dan tanggung jawab sosial gereja di tengah masyarakat digital. Melalui studi pustaka terhadap literatur mengenai teologi publik, *digital theology*, dan ruang publik digital, artikel ini menawarkan refleksi konseptual yang berupaya memperkaya pengembangan teologi publik agar lebih kontekstual terhadap dinamika masyarakat digital kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji secara konseptual transformasi media sosial sebagai ruang publik baru serta implikasinya terhadap pengembangan teologi publik di era digital. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang



relevan, meliputi buku akademik, artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, serta publikasi ilmiah yang membahas teologi publik, ruang publik, media sosial, dan *digital theology*. Untuk menjaga relevansi kajian, penelitian ini mengutamakan artikel-artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2021–2026), dengan tetap menggunakan karya-karya klasik sebagai landasan teoretis.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan utama dari berbagai literatur yang telah dipilih. Selanjutnya, hasil analisis disintesis secara kritis untuk membangun argumentasi teologis mengenai media sosial sebagai ruang publik baru dan relevansinya terhadap peninjauan ulang peran teologi publik dalam masyarakat digital (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Transformasi Ruang Publik di Era Digital

Konsep ruang publik (*public sphere*) merupakan salah satu gagasan yang paling berpengaruh dalam memahami hubungan antara masyarakat, komunikasi, dan kehidupan demokratis. Dalam karya klasik *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Jürgen Habermas (1989) mendefinisikan ruang publik sebagai arena tempat warga negara bertemu untuk mendiskusikan persoalan-persoalan bersama secara rasional dan kritis, sehingga opini publik dapat terbentuk secara bebas dari dominasi negara maupun kepentingan ekonomi. Dalam pengertian ini, ruang publik bukan sekadar lokasi fisik, melainkan ruang sosial yang memungkinkan berlangsungnya dialog, pertukaran gagasan, dan pembentukan kehendak bersama (*public will formation*). Oleh karena itu, keberadaan ruang publik menjadi salah satu prasyarat penting bagi kehidupan masyarakat yang demokratis (Habermas, 1989).

Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan karakter ruang publik yang digambarkan oleh Habermas. Jika pada masa sebelumnya diskursus publik berlangsung melalui surat kabar, televisi, forum masyarakat, maupun institusi-institusi sosial, kini sebagian besar percakapan publik berpindah ke ruang digital yang dimediasi oleh internet dan media sosial. Transformasi ini tidak hanya mengubah medium komunikasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat memproduksi informasi, membangun relasi sosial, serta membentuk opini publik. Dalam konteks tersebut, ruang publik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang digital yang memungkinkan jutaan individu berpartisipasi dalam percakapan publik tanpa dibatasi oleh wilayah geografis maupun waktu (Habermas, 2022).

Media sosial menjadi representasi paling nyata dari transformasi tersebut. Platform seperti Facebook, Instagram, X, YouTube, maupun TikTok telah berkembang menjadi arena tempat masyarakat mendiskusikan isu politik, ekonomi, budaya, lingkungan, hingga persoalan keagamaan. Informasi tidak lagi diproduksi secara eksklusif oleh lembaga media atau institusi tertentu, melainkan dihasilkan, disebarluaskan, dan diperdebatkan oleh para pengguna secara partisipatif. Dengan demikian, media sosial telah menggeser pola komunikasi publik dari model satu arah (*one-to-many communication*) menuju komunikasi multidirectional (*many-to-many communication*), di mana setiap individu berpotensi menjadi produsen sekaligus konsumen



informasi. Karakter partisipatif inilah yang menyebabkan media sosial sering dipahami sebagai bentuk baru ruang publik dalam masyarakat digital (van Oorschot, 2022).

Namun demikian, menyebut media sosial sebagai ruang publik baru tidak berarti bahwa ruang digital sepenuhnya mewujudkan cita-cita ruang publik sebagaimana dibayangkan Habermas. Berbeda dengan ruang publik klasik yang menempatkan rasionalitas komunikatif sebagai fondasi dialog, media sosial justru beroperasi melalui logika platform dan algoritma yang mengutamakan keterlibatan (*engagement*), popularitas, serta perhatian pengguna. Akibatnya, penyebaran informasi sering kali lebih ditentukan oleh mekanisme algoritmik daripada kualitas argumentasi. Situasi ini mendorong munculnya fenomena seperti *echo chambers*, polarisasi, disinformasi, dan budaya viral yang pada akhirnya memengaruhi kualitas percakapan publik. Dengan kata lain, media sosial memperluas ruang partisipasi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru terhadap pembentukan ruang publik yang sehat dan deliberatif (van Oorschot, 2022).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menciptakan ruang komunikasi baru, tetapi juga mentransformasi makna "publik" itu sendiri. Publik dalam masyarakat digital tidak lagi terbentuk melalui kehadiran fisik dalam satu ruang yang sama, melainkan melalui jaringan (*networked publics*) yang dibangun oleh interaksi digital, algoritma, serta arus informasi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena itu, pembahasan mengenai ruang publik pada era digital tidak lagi dapat dibatasi pada aspek komunikasi semata, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana teknologi membentuk pola relasi sosial, distribusi pengetahuan, serta praktik partisipasi masyarakat dalam kehidupan bersama. Perubahan inilah yang menjadi titik awal untuk meninjau kembali bagaimana teologi publik memahami makna kehadiran gereja di tengah masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Krisis Paradigma Teologi Publik di Tengah Transformasi Ruang Digital

Teologi publik lahir dari kesadaran bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan teologi yang berfokus pada kehidupan internal gereja, teologi publik menempatkan refleksi teologis sebagai bagian dari percakapan publik mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan bersama, seperti keadilan, perdamaian, kemiskinan, hak asasi manusia, demokrasi, maupun tanggung jawab terhadap ciptaan. Dalam pengertian ini, teologi publik tidak dimaksudkan untuk mendominasi ruang publik dengan bahasa keagamaan, melainkan menghadirkan perspektif iman yang mampu berdialog secara kritis, rasional, dan terbuka dengan berbagai kelompok dalam masyarakat plural (Tracy, 1981; Stackhouse, 2007).

Pemikiran tersebut berkembang ketika ruang publik masih dipahami terutama sebagai ruang sosial yang relatif stabil, yakni ruang di mana warga bertemu melalui institusi-institusi sosial, media massa, dunia akademik, maupun forum-forum demokratis. Dalam konteks tersebut, gereja dipandang sebagai salah satu aktor publik yang berpartisipasi melalui suara moral, pelayanan sosial, advokasi, dan dialog dengan masyarakat. Oleh sebab itu, banyak formulasi awal



teologi publik dibangun di atas asumsi bahwa ruang publik memiliki struktur yang memungkinkan berlangsungnya percakapan rasional demi kepentingan bersama.

Transformasi digital mengubah asumsi tersebut secara mendasar. Kehadiran media sosial telah menggeser ruang publik dari ruang yang didominasi institusi menuju ruang yang dikendalikan oleh platform digital. Percakapan publik tidak lagi berlangsung terutama melalui surat kabar, televisi, atau forum masyarakat, tetapi melalui jaringan digital yang diatur oleh algoritma, logika platform, dan ekonomi perhatian (*attention economy*). Akibatnya, pembentukan opini publik tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kualitas argumentasi, tetapi juga oleh mekanisme algoritmik yang menentukan konten mana yang memperoleh visibilitas, jangkauan, dan respons publik. Perubahan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak sekadar menghadirkan saluran komunikasi baru, tetapi juga mengubah struktur ruang tempat teologi publik menjalankan panggilannya (van Oorschot, 2022).

Perubahan struktur ruang publik tersebut menghadirkan tantangan baru bagi teologi publik. Jika selama ini dialog publik diasumsikan berlangsung melalui pertukaran argumentasi yang relatif terbuka, media sosial justru memperlihatkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Polarisasi, disinformasi, budaya viral, anonimitas, *echo chambers*, hingga penyebaran ujaran kebencian menunjukkan bahwa ruang publik digital sering kali dibentuk oleh kompetisi perhatian daripada pencarian kebenaran bersama. Dalam situasi seperti ini, kehadiran gereja tidak lagi cukup dipahami sebagai kemampuan menyampaikan pesan kepada publik, tetapi juga sebagai kemampuan membangun percakapan yang etis, kritis, dan memulihkan kualitas kehidupan bersama. Dengan kata lain, tantangan utama teologi publik pada era digital bukan sekadar bagaimana berbicara di media sosial, melainkan bagaimana menghadirkan praktik dialog yang tetap berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan martabat manusia di tengah budaya komunikasi yang semakin terfragmentasi (Habermas, 2022; van Oorschot, 2022).

Kesadaran inilah yang mendorong sejumlah teolog mulai meninjau kembali hubungan antara teologi publik dan digitalisasi. Van Oorschot (2022) menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya memengaruhi cara teologi berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara teologi memahami ruang publik sebagai tempat berteologi. Sejalan dengan itu, Okey (2023) menunjukkan bahwa pembacaan ulang terhadap pemikiran David Tracy membuka kemungkinan untuk memahami kembali konsep *publics* dalam konteks masyarakat digital yang ditandai oleh pluralitas ruang, mediasi teknologi, dan perubahan pola partisipasi publik. Dengan demikian, perhatian utama tidak lagi terletak pada pertanyaan apakah gereja harus hadir di media sosial, melainkan bagaimana teologi publik memahami makna "publik" ketika ruang publik sendiri telah mengalami transformasi yang mendasar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi teologi publik bukan sekadar persoalan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, melainkan persoalan paradigma. Pergeseran ruang publik menuju ruang digital menuntut peninjauan ulang terhadap asumsi-asumsi dasar mengenai kehadiran, dialog, kesaksian, dan tanggung jawab sosial gereja. Oleh karena itu, media sosial tidak dapat dipandang hanya sebagai instrumen pelayanan, tetapi sebagai lingkungan publik baru yang mengharuskan teologi publik merefleksikan kembali bentuk



kehadirannya dalam masyarakat digital. Kesadaran inilah yang menjadi landasan untuk mendiskusikan kembali bagaimana peran teologi publik perlu dipahami dan dijalankan dalam era digital.

Rekonstruksi Peran Teologi Publik dalam Ruang Publik Digital

Transformasi ruang publik menuju ruang digital menunjukkan bahwa tantangan utama teologi publik pada era media sosial bukan sekadar persoalan penggunaan teknologi, melainkan perubahan konteks tempat teologi menjalankan panggilannya. Jika ruang publik mengalami transformasi dalam struktur, pola komunikasi, dan mekanisme pembentukan opini, maka teologi publik juga perlu merekonstruksi cara memahami kehadiran dan keterlibatannya di tengah masyarakat. Rekonstruksi tersebut bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip dasar teologi publik, tetapi mengembangkan prinsip-prinsip tersebut agar tetap relevan dalam realitas masyarakat digital yang ditandai oleh konektivitas, mediasi teknologi, dan pluralitas ruang publik (van Oorschot, 2022).

Berdasarkan sintesis terhadap literatur mengenai teologi publik, *digital theology*, dan ruang publik digital, penelitian ini mengusulkan bahwa rekonstruksi teologi publik setidaknya mencakup empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu **kehadiran digital (*digital presence*)**, **dialog digital (*digital dialogue*)**, **kesaksian publik digital (*digital public witness*)**, dan **tanggung jawab digital (*digital responsibility*)**. Keempat dimensi ini bukan dimaksudkan sebagai paradigma baru yang menggantikan teologi publik klasik, melainkan sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana panggilan publik gereja dijalankan dalam masyarakat digital.

Kehadiran Digital (*Digital Presence*)

Dalam paradigma teologi publik klasik, kehadiran gereja di ruang publik sering dipahami melalui keterlibatan dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, maupun pelayanan masyarakat. Akan tetapi, ketika sebagian besar percakapan publik berlangsung di ruang digital, kehadiran publik gereja tidak lagi hanya diukur dari aktivitasnya di ruang fisik. Kehadiran digital bukan sekadar memiliki akun media sosial atau menyiarkan ibadah secara daring, tetapi menunjukkan partisipasi yang konsisten dalam percakapan publik mengenai isu-isu yang menyangkut kehidupan bersama. Dengan demikian, media sosial dipahami bukan sebagai alat promosi institusi, melainkan sebagai ruang tempat gereja menjalankan tanggung jawab publiknya melalui kehadiran yang etis, reflektif, dan dialogis (Okey, 2023).

Dialog Digital (*Digital Dialogue*)

Hakikat teologi publik selalu bertumpu pada dialog. Namun, dialog dalam ruang digital menghadapi tantangan yang berbeda dengan dialog dalam ruang publik konvensional. Algoritma, polarisasi, dan budaya komunikasi yang serba cepat sering kali mendorong percakapan menjadi reaktif dan konfrontatif. Oleh karena itu, rekonstruksi teologi publik perlu menempatkan dialog digital sebagai praktik membangun percakapan yang menghargai martabat manusia, terbuka terhadap perbedaan, dan berorientasi pada pencarian kebaikan bersama. Dalam konteks ini, gereja dipanggil bukan untuk memenangkan perdebatan di media sosial, tetapi menghadirkan budaya dialog yang memperkuat kepercayaan, memperluas ruang saling mendengar, dan memulihkan relasi yang terfragmentasi.



Kesaksian Publik Digital (*Digital Public Witness*)

Kesaksian gereja dalam masyarakat digital tidak lagi hanya disampaikan melalui mimbar, dokumen gerejawi, atau kegiatan sosial, tetapi juga melalui jejak digital (*digital footprint*) yang dibangun dalam ruang publik. Setiap unggahan, komentar, maupun bentuk interaksi digital turut membentuk cara masyarakat memahami identitas dan integritas gereja. Oleh karena itu, kesaksian publik digital tidak hanya berkaitan dengan isi pemberitaan Injil, tetapi juga dengan cara gereja membangun komunikasi yang mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti kejujuran, kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam perspektif ini, media sosial menjadi ruang kesaksian yang menuntut konsistensi antara pesan yang disampaikan dan praktik komunikasi yang dilakukan.

Tanggung Jawab Digital (*Digital Responsibility*)

Transformasi ruang publik juga membawa tanggung jawab etis yang semakin besar. Penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, hingga eksploitasi algoritma menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang yang netral. Oleh sebab itu, rekonstruksi teologi publik perlu menempatkan tanggung jawab digital sebagai bagian integral dari panggilan gereja. Tanggung jawab tersebut mencakup komitmen untuk membangun literasi digital, mendorong penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, memperjuangkan kebenaran, serta berpartisipasi dalam menciptakan ruang publik digital yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. Dengan demikian, kehadiran gereja di media sosial tidak berhenti pada aktivitas komunikasi, tetapi menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab moral terhadap kehidupan bersama.

Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak cukup dipahami sebagai sarana baru bagi pelayanan gereja. Sebaliknya, media sosial merupakan ruang publik yang membentuk cara masyarakat berdialog, membangun identitas, serta mengambil bagian dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, rekonstruksi teologi publik tidak berpusat pada pertanyaan bagaimana gereja menggunakan media sosial, melainkan bagaimana gereja menghidupi panggilannya sebagai aktor publik di dalam ruang digital yang terus membentuk kehidupan manusia. Dengan cara demikian, teologi publik tetap mempertahankan orientasinya pada kebaikan bersama, tetapi mengekspresikannya melalui bentuk-bentuk kehadiran yang sesuai dengan karakter masyarakat digital kontemporer.

Implikasi Eklesiologis: Kehadiran Gereja sebagai Aktor Publik di Ruang Digital

Rekonstruksi teologi publik dalam konteks masyarakat digital pada akhirnya tidak hanya membawa implikasi terhadap cara gereja menggunakan media sosial, tetapi juga terhadap cara gereja memahami identitas dan panggilannya sebagai komunitas iman di tengah dunia. Jika media sosial telah berkembang menjadi salah satu ruang utama tempat masyarakat membentuk opini, memperjuangkan nilai, dan mendiskusikan persoalan-persoalan bersama, maka kehadiran gereja di ruang digital bukan lagi merupakan pilihan strategis semata, melainkan bagian dari panggilan eklesiologisnya untuk hadir dalam kehidupan publik.



Dalam perspektif ini, gereja dipanggil untuk memandang ruang digital sebagai bagian dari konteks pelayannya. Kehadiran tersebut tidak dimaksudkan untuk memperluas pengaruh institusional ataupun sekadar meningkatkan visibilitas organisasi, melainkan menghadirkan nilai-nilai Injil dalam percakapan publik yang berlangsung di ruang digital. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kehadiran gereja di media sosial tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pengikut (*followers*), tingkat keterlibatan (*engagement*), ataupun jangkauan konten, tetapi oleh sejauh mana kehadiran tersebut mampu menghadirkan dialog yang membangun, memperjuangkan kebenaran, memelihara martabat manusia, serta mendorong terwujudnya kebaikan bersama. Perspektif ini sejalan dengan orientasi dasar teologi publik yang memahami gereja sebagai mitra dialog bagi masyarakat, bukan sebagai aktor yang menguasai ruang publik (Tracy, 1981; Stackhouse, 2007).

Di sisi lain, karakter media sosial yang dibentuk oleh algoritma dan ekonomi perhatian menuntut gereja untuk memiliki kebijaksanaan teologis dalam membangun komunikasi publik. Godaan untuk mengejar popularitas, respons emosional, atau viralitas dapat dengan mudah menggeser orientasi pelayanan dari kesaksian menuju pencarian perhatian. Dalam konteks ini, gereja perlu mengembangkan etika komunikasi digital yang berakar pada nilai-nilai Injil, sehingga setiap bentuk kehadiran digital tetap mencerminkan kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, kesaksian gereja tidak hanya tampak pada isi pesannya, tetapi juga pada cara gereja berkomunikasi dan berinteraksi di ruang publik digital.

Lebih jauh lagi, transformasi ruang publik digital mengingatkan bahwa panggilan gereja dalam masyarakat tidak pernah bersifat statis. Sebagaimana gereja pada berbagai periode sejarah terus menafsirkan kembali bentuk kehadirannya sesuai dengan perubahan konteks sosial, demikian pula masyarakat digital menuntut refleksi teologis yang terus berkembang. Rekonstruksi teologi publik yang diusulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar media komunikasi baru, melainkan ruang publik yang membentuk pola kehidupan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, panggilan gereja pada era digital bukan hanya memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pelayanan, tetapi menghidupi tanggung jawab publiknya melalui kehadiran yang dialogis, kesaksian yang autentik, dan komitmen terhadap terwujudnya kehidupan bersama yang lebih adil, damai, dan manusiawi.

Dengan demikian, refleksi mengenai media sosial sebagai ruang publik baru memperlihatkan bahwa transformasi digital bukan ancaman bagi teologi publik, melainkan kesempatan untuk memperluas horizon refleksi teologis mengenai kehadiran gereja di tengah masyarakat. Ketika ruang publik mengalami perubahan, teologi publik juga dipanggil untuk terus memperbarui cara memahami dan menghidupi misinya tanpa kehilangan orientasi dasarnya, yaitu menghadirkan kesaksian iman yang relevan, dialogis, dan bertanggung jawab bagi kehidupan bersama.

KESIMPULAN

Transformasi media sosial telah mengubah secara mendasar karakter ruang publik dari ruang sosial konvensional menjadi ruang digital yang membentuk cara masyarakat berkomunikasi, berdialog, dan membangun opini publik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai sarana komunikasi, tetapi sebagai ruang publik baru yang turut



menentukan dinamika kehidupan bersama. Dalam konteks ini, artikel ini menunjukkan bahwa perubahan ruang publik tidak hanya membawa konsekuensi bagi praktik komunikasi gereja, tetapi juga menantang asumsi-asumsi dasar teologi publik yang selama ini berkembang dalam konteks ruang publik konvensional. Oleh karena itu, teologi publik tidak cukup hanya beradaptasi dengan perkembangan teknologi, melainkan perlu merekonstruksi cara memahami kehadiran, dialog, kesaksian, dan tanggung jawabnya dalam masyarakat digital.

Berdasarkan sintesis terhadap kajian teologi publik, ruang publik, dan *digital theology*, artikel ini mengusulkan kerangka konseptual yang menempatkan rekonstruksi teologi publik dalam empat dimensi, yaitu kehadiran digital (*digital presence*), dialog digital (*digital dialogue*), kesaksian publik digital (*digital public witness*), dan tanggung jawab digital (*digital responsibility*). Keempat dimensi tersebut menjadi kontribusi konseptual artikel ini dalam memahami kembali peran gereja sebagai aktor publik di era digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya dipandang sebagai media pelayanan, tetapi sebagai ruang kesaksian publik yang menuntut kehadiran gereja secara etis, dialogis, dan transformatif. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kerangka ini melalui studi empiris pada berbagai konteks gereja atau komunitas iman, sehingga rekonstruksi teologi publik yang ditawarkan dalam artikel ini dapat diuji, diperkaya, dan dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat digital yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, H. A., & Cheong, P. H. (Eds.). (2022). *The Oxford handbook of digital religion*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197549803.001.0001>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Habermas, J. (2022). *A new structural transformation of the public sphere and deliberative politics*. Polity Press.
- Kurlberg, J. (Ed.). (2026). *The Oxford handbook of digital theology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780191980114.001.0001>
- Okey, S. (2023). Reconsidering David Tracy's public theology in a digital age. *International Journal of Public Theology*, 17(3), 321–345. <https://doi.org/10.1163/15697320-20230093>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stackhouse, M. L. (2007). *Public theology and political economy: Christian stewardship in modern society*. Wm. B. Eerdmans Publishing.



Tracy, D. (1981). *The analogical imagination: Christian theology and the culture of pluralism*. Crossroad.

van Oorschot, F. (2022). Public theology facing digital spaces: Public theology, digital theology and changing spaces for theological reasoning. *International Journal of Public Theology*, 16(1), 55–73. <https://doi.org/10.1163/15697320-01540029>

van Oorschot, F., & Höhne, F. (2026). Public theology and digitality. Dalam J. Kurlberg (Ed.), *The Oxford handbook of digital theology* (pp. 64–78). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780191980114.003.0006>